



POLICY BRIEF

Januari 2021

Mengembangkan Desa Tanggap dan Tangguh Pandemi Covid 19

Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang dilanda gelombang resesi karena dampak pandemi Covid 19. Data yang dilansir Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 31 Juli 2020 tidak kurang dari 3,5 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan, sampai dengan Oktober 2020 sudah lebih dari 6,4 juta pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Data tersebut mengkonfirmasi banyaknya perusahaan yang tutup selama 9 bulan lebih masa pandemi.

Sebelumnya Menko Kesra menyatakan, sampai dengan April 2020 sedikitnya 60 persen industri mengalami kebangkrutan dan tutup. Dari sekitar 40 persen industri, saat ini hanya 15.747 industri yang masih berjalan. Sementara, bagi perusahaan yang masih bertahan, berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa terus beroperasi di tengah situasi krisis. Mereka mengurangi karyawan, atau bahkan memutuskan hubungan kerja. Akibatnya, angka pengangguran naik cukup signifikan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merelease data pengangguran di Indonesia pada periode Agustus 2020 bertambah 2,67 juta orang. Angka ini setara dengan 5,23 persen dari jumlah pengangguran terbuka di Indonesia. Peningkatan angka pengangguran tersebut menambah jumlah total pengangguran

di Indonesia menjadi 9,77 juta orang berbagai tekanan ekonomi yang sebagian besar terjadi di perkotaan tersebut, saat ini melahirkan sebuah fenomena baru yang disebut dengan ruralisasi. Fenomena ruralisasi adalah kembalinya para perantau yang bekerja di berbagai sektor perkotaan dan bermukim di kota-kota menuju ke desanya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan ada sekitar 805.479 orang yang telah kembali ke desanya. Fenomena ruralisasi ini disebabkan oleh 3 faktor berikut ini. **Pertama**, epicentrum pandemi banyak terjadi di kota-kota besar. Pulang kembali ke desa adalah pilihan aman dan nyaman. **Kedua**, kekuatan jaring pengaman sosial di desa. Para perantau memiliki sanak keluarga dan tetangga yang bisa menjadi modal sosial untuk bertahan hidup. **Ketiga**, banyak bantuan pemerintah masuk ke desa, seperti Bansos, BLT Desa, Program Keluarga Harapan, dan lainnya.

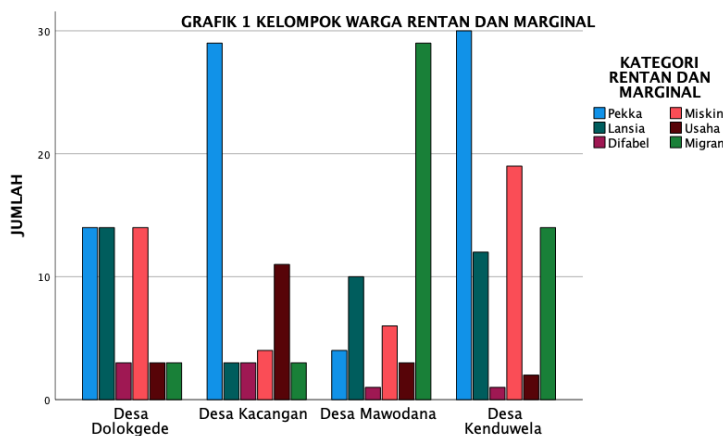
Dari tiga faktor tersebut membuktikan, bahwa desa saat ini menjadi benteng pertahanan terakhir masyarakat dari tekanan situasi pandemi. Sayangnya, hanya sedikit desa yang sadar dan siap menghadapi situasi tersebut. Pengalaman Konsorsium Penguatan Desa Tangguh Covid 19 (PDTC) dalam mengelola proyek sejauh ini di 4 desa memberikan pembelajaran yang menarik. Program tersebut bertujuan memperkuat

ketangguhan desa dalam menangani dan mengelola beragam risiko akibat pandemi Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro dan Sumba Barat Daya. Ada sejumlah temuan menarik di 4 desa tersebut yang idealnya masih bisa didorong lebih baik dan berkualitas di masa depan. Pertanyaan menariknya, bagaimana desa mengembangkan diri untuk tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana seperti saat ini? Bagaimana sinergi pemerintah daerah dan desa bisa diwujudkan untuk menghadapi bencana?

Ketangguhan Sosial dan Ekonomi Desa

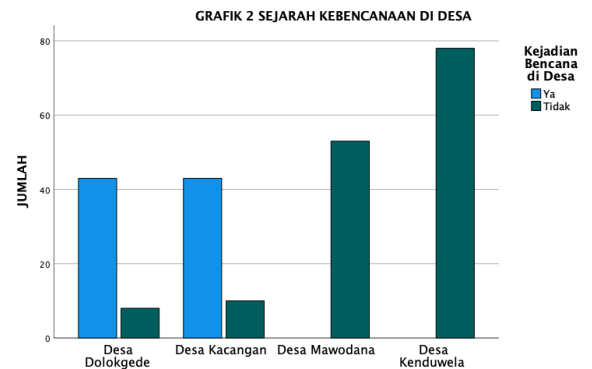
Konsorsium PDTC memperoleh pembelajaran penting dari 4 desa di Kabupaten Bojonegoro dan Sumba Barat Daya dalam aspek sosial ekonomi masyarakat dan tata Kelola

miskin, lansia, kehilangan pekerjaan dan pekerja migran. Mereka ini rentan pada saat bencana. Dengan survei desa ini, diharapkan pemerintah desa melembagakannya untuk mengembangkan basis data desa. Sehingga penanganan bencana di desa bisa berbasis data.



Sumber : Survei Konsorsium PDTC, 2020

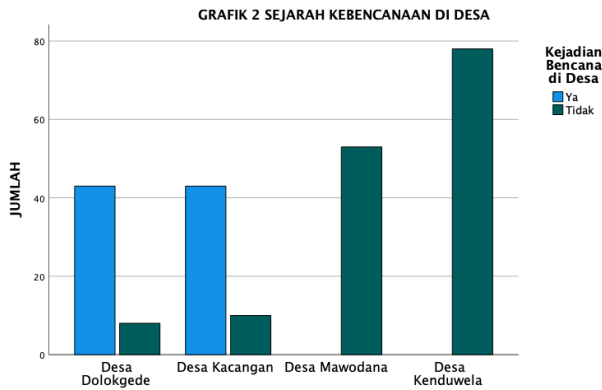
pemerintahan desa. **Pertama**, ketersediaan data. Persoalan klasik pada saat bencana terjadi adalah distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Penyebab utamanya adalah data yang digunakan pemerintah tidak akurat dan valid. Bahkan sering ditemukan data yang dimiliki pemerintah desa berbeda atau tidak sinkron dengan pemerintah supradesa. Menyadari hal ini, maka Konsorsium PDTC mengajak kelompok warga rentan dan marginal desa mendata sendiri, seperti tersaji pada **Grafik 1**. Hasil survei Konsorsium PDTC, misalnya, memperlihatkan kelompok warga PEKKA di 4 desa mencapai 32,8 %, dan 3,4 % Difable. Kelompok warga rentan dan marginal lainnya dalam survei ini adalah warga



Sumber : Survei Konsorsium PDTC, 2020

Kedua, perspektif bencana dan kesiapsiagaannya. Desa masih belum memiliki perspektif kebencanaan yang kuat, baik dalam aspek kesejarahan maupun jenis atau bentuk bendanya. **Grafik 2** mengonfirmasi, setidaknya, pengetahuan sejarah bencana di 4 desa. Secara nyata 4 desa ini menjadi kawasan yang rentan bencana banjir, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi dan wabah penyakit. Data ini memperlihatkan bahwa jenis bencana alam dan non alam ternyata belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan kerentanan bencana teknologi akibat eksplorasi migas di Bojonegoro, belum juga dipahami masyarakat 2 desa yang terdampak langsung ini. Konsorsium PDTC telah menginisiasi pada kelompok masyarakat rentan dan marginal maupun pemerintah desa untuk memiliki perspektif kebencanaan dan kesiapsiagaan. Mereka mulai bergerak dan mengembangkan ketangguhannya melalui skema sosial (penguatan kelompok rentan dan marginal), skema ekonomi berbagi dan model ketahanan pangan desa.

Ketiga, penghidupan berkelanjutan di desa. Skema penghidupan berkelanjutan memang belum tergarap baik di setiap desa. Padahal desa selalu menjadi benteng pertahanan terakhir dikala bencana. Fenomena ruralisasi pada saat 5 tahun terakhir dan semakin menguat ketika pandemi Covid



Sumber : Survei Konsorsium PDTC, 2020

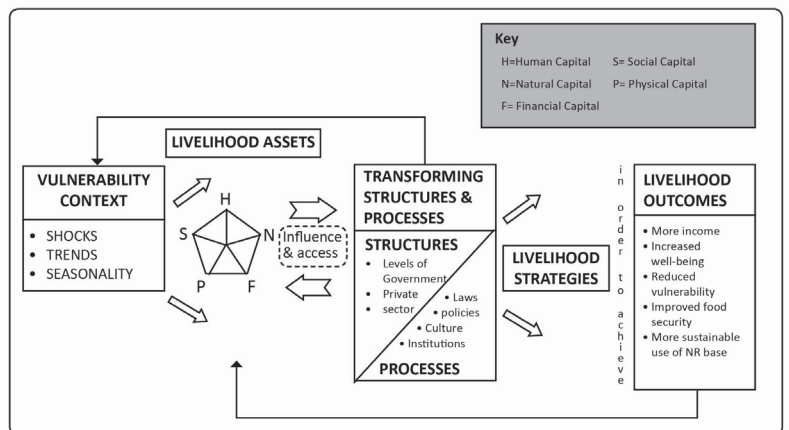
19, ternyata belum menyadari desa untuk mengembangkan kehidupan berkelanjutan. Bahkan masyarakat desa nampaknya belum tergugah kesadarannya dalam nalar ekonomi darurat ketika pandemi Covid 19 ini. **Grafik 3** mengonfirmasi rumah tangga penghasil pangan di 2 desa Bojonegoro yang mayoritas tidak mengalokasikan anggaran usaha produktif. Sedangkan rumah tangga di 2 desa SBD semuanya bukan penghasil pangan.

Keempat, ketersambungan program pemerintah daerah dan desa. Progam/kegiatan pemerintah daerah kabupaten tidak sinkron dengan pemerintah desa. Misalnya, pemerintah daerah membuat aplikasi digital pemasaran produk pertanian di masa pandemi ini, sementara itu pemerintah desa justru menyelenggarakan pelatihan kerajinan batik kayu dan batako bagi rumah tangga miskin. Praktik seperti ini bermasalah secara substansi atau fokus pemberdayaan masyarakat miskin desa.

Selain 4 pembelajaran tadi, ditemukan pula masyarakat desa yang cenderung spontan dalam merespon pandemi ini. Pada awal pandemi, masyarakat desa spontan dalam menjaga dan melindungi dirinya dari paparan virus. Mereka membentuk semacam satuan tugas yang mensosialisasikan bahaya ancaman virus, mengawasi arus keluar masuk orang di wilayahnya, mengkarantina orang yang berasal dari “zona merah”, dan lainnya.

Sayang sekali spontanitas ini belum bisa terlembaga ke dalam kebijakan desa.

Praktik spontanitas membangun daya tahan komunitas tidak bisa bertahan lama. Salah satu faktor penyebabnya adalah desakan kebutuhan ekonomi. Spontanitas warga dalam bentuk ‘lockdown’ wilayah pelan-pelan dilonggarkan, karena kebutuhan dasar warga tidak dicukupi pemerintah. Skema bantuan pemerintah, bersumber dari APBDesa, APBD, dan APBN, ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat penerima bantuan akhirnya tetap melakukan mobilitas di luar rumah, mencari penghidupan yang masih dirasa kurang. Karena komunitas lepas kendali dan pemerintah semakin melonggarkan pengawasannya, situasinya dianggap “sudah kembali normal”, bagai tak ada pandemi. Akibatnya, orang yang terpapar Covid 19 semakin hari semakin banyak jumlahnya.



Sumber : Chambers dan Conway, 1992

Pada konteks demikian, desa sebenarnya memiliki posisi strategis dalam membangun basis ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan *pentagon asset* yang diperkenalkan bisa dipakai sebagai perspektif dalam memaksimalkan potensi desa untuk mengembangkan kerangka kerja penghidupan berkelanjutan. Perspektif *pentagon asset* pada prinsipnya mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, aset fisik, modal social, dan keuangan untuk kepentingan desa. Dalam perspektif UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, aset lain yang saat ini dimiliki desa adalah kewenangan untuk

mengelola dan mengatur desanya sendiri. Artinya, jika kewenangan yang dimiliki desa dipakai untuk mengelola aset yang ada di desa, peluang ekonomi menjadi semakin baik sangat terbuka.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tadi, kami mengusulkan rekomendasi kebijakan berikut ini.

1. **Pemerintah Daerah Kabupaten.** Dalam rangka memperbaiki kebijakan dan tata kelola urusan kebencanaan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk bersinergi dengan desa. Dalam UU Desa dimandatkan, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa. Sehingga urusan kebencanaan dan ketangguhan masyarakat desa dalam mempersiapkan diri maupun menghadapi bencana, seperti pandemi Covid 19, dalam beberapa aspek termasuk menjadi kewenangan desa. Karena itu, pemerintah daerah kabupaten penting bersinergi dengan desa untuk saling berbagi kewenangan dalam tata kelola urusan kebencanaan. Misalnya, Pemerintah daerah melalui BPBD berkolaborasi dengan desa mengembangkan Destana (Desa Tangguh Bencana). Desa berwenang menyiapkan SDM desa termasuk anggaran pendukungnya, sedangkan BPBD mengalokasikan program/kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan pendampingan Destana.
2. **Pemerintahan Desa.** Bencana pandemi Covid 19 ini sebaiknya menjadi momentum bagi desa untuk meninjau kembali dokumen RPJMDesa yang dimilikinya. Dalam mereview RPJM Desa, seharusnya desa mengembangkan peta jalan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana di desa. Desa pun penting mengembangkan sistem informasi desa (SID) guna memastikan informasi kelompok warga terdampak dan segala potensi desa yang bisa dioptimalisasikan untuk penanganan bencana. Peta jalan dan SID ini dikembangkan secara komprehensif, mulai dari tata ruang, tata guna lahan, kelembagaan, sistem sosial ekonomi dan skema ketahanan pangan desa.

Pelembagaan desa Tangguh bencana (Destana) pun mesti tercermin jelas di dalam dokumen RPJM Desa ini.

Daftar Bacaan

Chambers, Robert dan G. Conway (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (Brighton, England)

DFID (Departement for International Development). Sustainable Livelihood Guidance Sheet. Diakses di http://www.efls.ca/webresources/DFID_Sustainable_livelihoods_guidance_sheet.pdf

Website

<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbac-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all>

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGrVnk-60-persen-lebih-industri-tutup-saat-pandemi-covid-19>

<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang>

Policy Brief ini disusun oleh Titok Hariyanto dan Sunaji Zamroni, serta diedit oleh Zhafira Permadi. Policy Brief merupakan akumulasi pengetahuan yang dihasilkan Konsorsium Penguatan Desa Tanggap Covid 19 (Konsorsium PDTC) setelah melaksanakan Proyek Memperkuat Ketangguhan Desa dalam Mencegah, Menangani dan Mengelola Risiko Akibat Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro dan Sumba Barat Daya, yang didukung oleh Pemerintah Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Program SIAP SIAGA. Namun demikian, temuan, penafsiran, dan kesimpulan dalam Policy Brief ini merupakan pandangan dari Konsorsium dan bukan mencerminkan pandangan dari SIAP SIAGA, Pemerintah Australia, maupun Pemerintah Indonesia.

Konsorsium Penguatan Desa Tanggap Covid-19 (Konsorsium PDTC) terdiri dari 4 organisasi, yaitu Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Ademos), Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders (YPKD), Atmawidya Alterasi Indonesia (AAI/Alterasi), dan Association of Resiliency Movement (ARM) Indonesia.

Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Ademos)

Desa Dolokgedede RT.10/RW.02Jalan Raya Purwosari - Ngambon Km 13 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia